



EDISI KAMIS 30 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TOP



Seberangi Sungai Demi Ilmu

Siswa SD Negeri Padahayu 2 terpaksa menyeberangi Sungai Cipunten Agung di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten, demi bisa pergi ke sekolah pada Rabu (29/7/2026). Hal ini terjadi saat pemerintah mengklaim telah menyelesaikan pembangunan 1.416 titik Jembatan Garuda atau jembatan perintis yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Harapan agar anak-anak sekolah tak bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras demi menuntut ilmu pun bak jauh panggang dari api. (Antara.ist)

SUDAH 17 PEMENANG PILKADA 2024 TERJERAT KPK

Bupati Pemalang Jual Beli Jabatan, Rp 2 Miliar Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menciduk kepala daerah lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini giliran Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang diamankan tim penyidik. Penangkapan ini menempatkan Anom sebagai kepala daerah hasil Pilkada 2024 ke-17 yang tersandung korupsi dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun sejak pelantikan serentak. Di level Jawa Tengah, kasus tersebut juga memperpanjang daftar kelam. Anom menjadi kepala daerah kelima di Provinsi Jateng yang dicituk di 2026. Sebelumnya Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman; Bupati Sukoharjo Etik Suryani; Bupati Pati Sudewo, dan Bupati Pekalongan Fadia Arafik juga terjerat rasuah. Vonis ringan yang dijatuhkan pengadilan diduga menjadi pemicu gagalnya efek jera. Hukum akhirnya cuma dihitung sebagai risiko murah oleh para pejabat. Heran. **BACA SELINGKAPNYA DI HAL 11....**

17 KEPALA DAERAH HASIL PILKADA 2024

TERJARING OTT KPK (PER JULI 2026)



Abdul Azis
(Bupati Kolaka Timur)

Suap proyek RSUD, komitmen fee Rp9 miliar.
Vonis 4 tahun 3 bulan.



Abdul Wahid
(Gubernur Riau)

Pemerasan ASN PUPR. Terdakwa, dituntut
8,5 tahun.



Sugiri Sancoko
(Bupati Ponorogo)

Suap jabatan & proyek RSUD, gratifikasi
Rp6,7 miliar. **Terdakwa.**



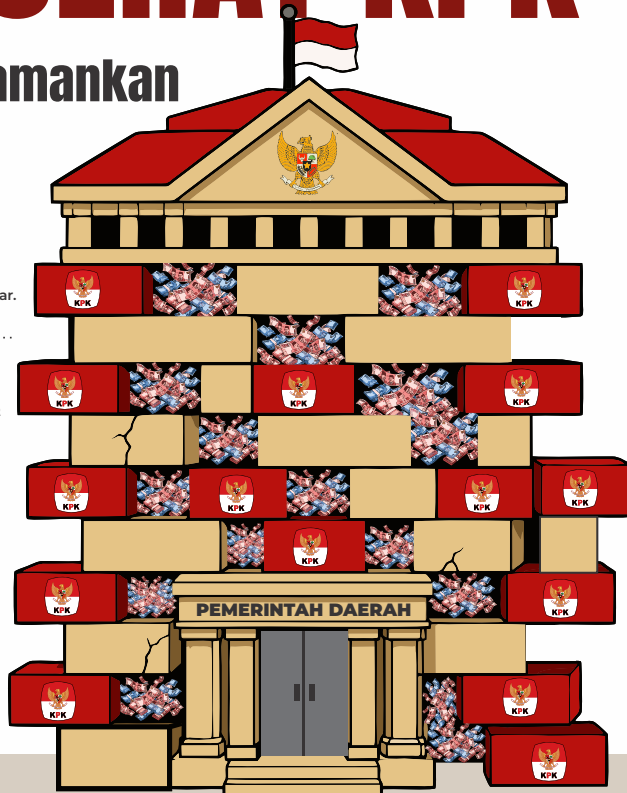
Ardito Wijaya
(Bupati Lampung Tengah)

Korupsi proyek pengadaan. **Terdakwa.**



Ade Kuswara Kunang
(Bupati Bekasi)

Fee proyek & suap perizinan. **Terdakwa.**



Ditangkap pada 2025

02

GOVERNMENTTODAY
490 Pemda Tak Mampu Bayar Gaji ASN,
Pemerintah Suntik Dana?

05

NUSANTARA
Jejak Dolar Singapura dari Kuansing untuk Raja Juli

10

LISTSTYLE
Rahasia Gaya Old Money yang Terlihat Elegan dan
Tak Lekang Waktu

490 PEMDA TAK MAMPU BAYAR GAJI ASN, PEMERINTAH SUNTIK DANA?

Pemerintah menyiapkan skema tambahan anggaran bagi ratusan pemerintah daerah (pemda) yang mengalami tekanan fiskal setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, hasil pemantauan sementara menunjukkan sekitar 490 daerah berpotensi membutuhkan dukungan dana agar tetap mampu membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) dan menjalankan pelayanan dasar.

Menurut Purbaya, pemerintah sejak awal telah memproyeksikan bahwa pemotongan TKD akan berdampak pada kemampuan fiskal sebagian daerah. Karena itu, Kementerian Keuangan kini memantau kondisi keuangan seluruh pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan riil masing-masing wilayah.

"Ini sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity," kata Purbaya di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan terhadap seluruh daerah di Indonesia untuk memastikan wilayah mana yang benar-benar memerlukan intervensi pemerintah pusat.

"Jadi saya monitor untuk setiap daerah di seluruh Indonesia, di mana yang kira-kira kurang akan kita hitung," ujarnya.

Purbaya mengatakan jumlah daerah yang berpotensi menerima tambahan anggaran mencapai sekitar 490 pemerintah daerah. Namun, keputusan akhir mengenai pencairan bantuan tersebut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin sampai seluruhnya, 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana. Tapi itu tergantung pada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa," katanya.

Meski demikian, angka 490 tersebut tidak berarti seluruh daerah telah gagal membayar gaji pegawai. Pemerintah sebelumnya mengidentifikasi sekitar 39 daerah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara ratusan daerah lainnya masih dalam proses pemetaan untuk mengetahui tingkat kemampuan fiskalnya.

Tekanan fiskal itu menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Secara nasional, pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 30 persen dari total penerimaan daerah, sedangkan sisanya masih berasal dari transfer pemerintah pusat.

Pada 2026, alokasi TKD tercatat sebesar Rp693 triliun atau turun sekitar Rp226,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, beban belanja pegawai meningkat seiring



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (ist)

bertambahnya jumlah PPPK yang kini menjadi bagian dari belanja APBD.

Di sejumlah daerah, porsi belanja pegawai bahkan telah melampaui separuh total anggaran. Kabupaten Sigi, misalnya, mengalokasikan sekitar 60 persen APBD untuk belanja pegawai, sedangkan Kabupaten Donggala sekitar 53 persen. Kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.

Pemerintah pusat meminta daerah lebih dahulu melakukan efisiensi sebelum mengajukan tambahan anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai masih terdapat sejumlah pos belanja yang dapat dipangkas, seperti perjalanan dinas, hibah, kegiatan seremonial, hingga pengeluaran lain yang tidak mendesak.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Ini tolong dikerjakan dulu, jangan menyerah dulu," kata Tito.

Tambahan dana dari pemerintah pusat, kata Tito, akan menjadi pilihan terakhir bagi daerah yang benar-benar tidak lagi mampu memenuhi kewajiban membayar pegawai.

Salah satu daerah yang telah melakukan penyesuaian anggaran adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengumumkan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebagai langkah menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Dalam pernyataan melalui akun Instagram pribadinya, Sherly lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas kebijakan tersebut.

"Pertama, saya menyampaikan

permohonan maaf. Saya memahami keputusan ini tidak mudah," ujar Sherly. Ia menjelaskan, ruang fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2026 semakin terbatas, sementara beban belanja pegawai meningkat, termasuk pembayaran gaji dan TPP bagi PPPK yang kini menjadi bagian dari APBD.

Karena itu, pemerintah provinsi memutuskan menyesuaikan TPP sebesar 20 persen bagi ASN eselon I hingga IV, serta 10 persen bagi staf PNS dan PPPK. Kebijakan tersebut diiringi dengan langkah efisiensi belanja dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Keputusan ini bukan karena berkurangnya penghargaan kepada ASN, melainkan ikhtiar bersama menjaga keuangan daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan pembangunan tidak terhenti," kata Sherly.

Ia berharap seluruh ASN dapat memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.

"Terima kasih atas pengertian, dedikasi, dan semangat pengabdian seluruh ASN Maluku Utara. Bersama, kita menjaga fiskal daerah agar tetap sehat demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," tutupnya.

Pemda Diminta Tak Pecat ASN

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak mengambil langkah pemecatan atau pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) meski menghadapi tekanan fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Sebaliknya, daerah diminta lebih dahulu melakukan efisiensi anggaran,

REALISASI DANA TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I-2026

○ Semester I 2025

RP 402,5 Triliun

○ Semester I 2026

RP 357,4 Triliun

○ Penurunan

11,2 Persen

PAGU TKD DALAM APBN

○ 2025

RP 919,9 Triliun

○ 2026

RP 693 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

sementara pemerintah pusat menyiapkan berbagai skema bantuan bagi daerah yang benar-benar tidak mampu membayar belanja pegawai.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui terdapat sejumlah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kepala daerah untuk langsung mengurangi jumlah ASN.

"Tentu kami meminta agar kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian. Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya ya, sejauh mana kemudian betul-betul darurat, ya baru kemudian berkomunikasi dan kita akan carikan jalan keluar bersama," kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Bima mengatakan Kemendagri masih terus memetakan daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Pendataan tersebut dilakukan bersama Kementerian Keuangan sebagai dasar penentuan langkah penanganan. (gus,ist,kum/dya)

Gaduh Perubahan Penilaian Mutu RS

DPR DUKUNG AKREDITAS BERBASIS OUTCOME

Pemerintah mulai menggeser paradigma penilaian mutu rumah sakit di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana meninggalkan sistem akreditasi yang selama ini bertumpu pada pemenuhan dokumen administrasi menuju sistem yang mengukur hasil nyata pelayanan kesehatan atau clinical outcome. Perubahan tersebut mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI, meski di saat yang sama memunculkan kekhawatiran dari sebagian kalangan tenaga kesehatan terkait potensi dampaknya terhadap pelayanan pasien berisiko tinggi.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai langkah Kementerian Kesehatan layak didukung selama tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Menurutnya, perubahan mekanisme akreditasi merupakan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan pemerintah sehingga tidak memerlukan pembahasan khusus di DPR.

"Jika sistem baru akreditasi rumah sakit itu orientasinya bisa untuk meningkatkan pelayanan pasien, saya setuju," kata Zainul, Rabu (29/7).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan Komisi IX tetap akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta laporan hasil implementasi apabila kebijakan mulai diterapkan. Bagi DPR, yang terpenting bukan perubahan mekanismenya, melainkan apakah kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perbaikan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Yang penting orientasi dan output dari kebijakannya untuk perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat kita dukung. Nanti kita minta update hasilnya saja," ujarnya.

Perubahan sistem akreditasi merupakan bagian dari reformasi besar sektor kesehatan yang tengah dijalankan Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa indikator mutu rumah sakit di berbagai negara telah menggunakan outcome atau hasil pelayanan yang diterima pasien sebagai tolok ukur utama, bukan sekadar kepatuhan terhadap administrasi.

"Di seluruh dunia indikator mutu rumah sakit itu outcome. Jadi kita enggak reinvent the wheel, itu menyamakan supaya standar layanan rumah sakit kita sama dengan standar di dunia," kata Budi.

Ia menilai Indonesia justru akan tertinggal apabila tetap mempertahankan sistem penilaian yang lebih banyak menitikberatkan pada kelengkapan dokumen administrasi.

"Kalau di semua pakai outcome tapi kita makainya adalah ngisi administrasi, ceklis ini kan jadi aneh sendirinya," ujarnya.

Dalam sistem baru tersebut, akreditasi rumah sakit tidak lagi



Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers usai rapat terkait MBG, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).ist

dilakukan semata melalui evaluasi administrasi setiap lima tahun.

Sebaliknya, mutu pelayanan akan dipantau secara berkelanjutan menggunakan indikator klinis seperti angka kesembuhan pasien, tingkat keselamatan pasien (survival rate), angka keberhasilan tindakan medis, hingga berbagai indikator kualitas pelayanan lainnya.

Konsekuensinya, status akreditasi rumah sakit dapat berubah sewaktu-waktu apabila kinerja pelayanan mengalami penurunan.

Khawatir Pasien Kritis Dihindari

Rumah sakit yang menunjukkan tingginya angka kegagalan tindakan medis atau indikator keselamatan pasien yang memburuk berpotensi mengalami penurunan status akreditasi tanpa harus menunggu siklus evaluasi berikutnya.

"Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan. Ini bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat," kata Budi.

Menurut Kemenkes, pendekatan tersebut akan membuat penilaian mutu rumah sakit lebih objektif karena didasarkan pada hasil pelayanan yang benar-benar dirasakan pasien. Selama ini, rumah sakit dinilai lebih banyak berfokus memenuhi persyaratan administrasi menjelang proses akreditasi dibandingkan menjaga kualitas

pelayanan secara berkesinambungan.

Namun demikian, rencana tersebut memunculkan perdebatan di kalangan tenaga kesehatan. Sejumlah dokter mengkhawatirkan sistem berbasis clinical outcome justru menimbulkan insentif yang keliru. Rumah sakit dikhawatirkan akan menghindari pasien dengan kondisi kritis atau penyakit yang memiliki risiko kematian tinggi demi mempertahankan indikator keberhasilan pelayanan.

Kekhawatiran itu ramai disampaikan melalui media sosial. Beberapa dokter menilai rumah sakit bisa saja lebih memilih merujuk pasien dengan kondisi berat dibandingkan merawatnya agar angka keberhasilan tindakan medis tetap tinggi dan tidak memengaruhi penilaian akreditasi.

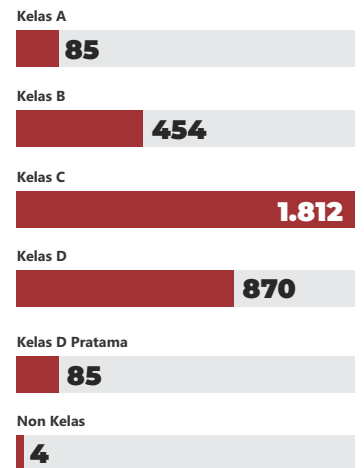
Menanggapi kritik tersebut, Budi memastikan sistem baru tidak akan menggunakan standar yang sama untuk seluruh rumah sakit. Penilaian akan disesuaikan dengan kapasitas, kompetensi, jenis layanan, serta kompleksitas kasus yang memang menjadi kewenangan masing-masing rumah sakit.

"Yang nomor dua, nanti akan disesuaikan dengan kompetensi yang ada di rumah sakit itu masing-masing," tegasnya.

Dengan pendekatan tersebut, rumah sakit rujukan nasional yang setiap hari menangani kasus-kasus kompleks tidak akan dibandingkan dengan rumah sakit daerah yang hanya melayani pelayanan dasar. Penilaian akan mempertimbangkan karakteristik masing-masing fasilitas

DATA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS) KEMENTERIAN KESEHATAN RI

jumlah rumah sakit di Indonesia
saat ini mencapai 3.310 unit.



kesehatan sehingga tidak menciptakan disinsentif bagi rumah sakit untuk tetap menerima pasien kritis.

Perubahan sistem akreditasi juga menjadi bagian dari paket reformasi kesehatan yang lebih luas. Bersamaan dengan itu, Kementerian Kesehatan menjalankan kebijakan efisiensi pengadaan obat dan bahan medis habis pakai melalui sistem pool procurement berbasis platform SatuSehat. Kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat anggaran farmasi nasional antara Rp1 triliun hingga Rp2 triliun pada tahap awal sekaligus menekan harga obat dan alat kesehatan agar lebih murah bagi rumah sakit pemerintah maupun swasta.

"Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah," ujar Budi.

Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun guna menjaga arus kas rumah sakit, terutama karena sebagian besar fasilitas kesehatan yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan rumah sakit swasta. (gus,ist,rls/dya)

PABRIK GULA WAJIB MILIKI LAHAN TEBU SENDIRI

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola industri gula nasional demi mengejar target swasembada gula dalam dua tahun sebagaimana diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut ditempuh melalui percepatan peremajaan tanaman tebu, penertiban industri gula rafinasi. Serta, kewajiban bagi seluruh pabrik gula rafinasi memiliki kebun tebu sendiri sebagai sumber bahan baku.

TREN VOLUME IMPOR GULA TAHUNAN

- 2025
3,93 juta ton
- 2024
5,31 juta ton
- 2023
5,07 juta ton
- 2022
6,01 juta ton
- 2021
5,48 juta ton
- 2020
5,54 juta ton



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menko Zulkifli Hasan mendampingi Peesiden Prabowo saat meninjau kebun tebu. (Dok.ist)

disiapkan pemerintah ialah percepatan peremajaan tanaman tebu atau bongkar ratoon. Program tersebut ditargetkan mencakup lahan seluas 100.000 hektare pada 2026 dan meningkat menjadi 150.000 hektare pada 2027.

Pemerintah menilai langkah ini sangat mendesak karena sekitar 85 persen tanaman tebu nasional telah berusia tua sehingga produktivitasnya terus menurun.

"Langkah tersebut menjadi sangat mendesak mengingat sekitar 85 persen tanaman tebu nasional telah berusia tua dan tidak lagi produktif. Sehingga perlu segera diremajakan dengan varietas unggul dan budidaya yang lebih modern," ujar Amran.

Target percepatan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta agar swasembada gula dapat dicapai hanya dalam waktu dua tahun. Saat menghadiri Panen Raya Serentak di Malang beberapa waktu lalu, Prabowo mengungkapkan program peremajaan tebu bahkan sempat terhenti selama 12 tahun.

Target 2 Tahun

Semula Kementerian Pertanian memperkirakan peremajaan 100.000 hektare per tahun membutuhkan waktu empat tahun. Namun setelah berdiskusi dengan Amran, pemerintah memutuskan mempercepat seluruh program sehingga target swasembada dipangkas menjadi dua tahun.

Selain persoalan produktivitas kebun, pemerintah juga menyoroti derasnya gula rafinasi yang diduga merembes ke pasar konsumsi. Menurut Amran, kondisi tersebut membuat gula produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dan berdampak

langsung terhadap kinerja perusahaan negara maupun petani.

Ia menyebut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mengalami kerugian sekitar Rp600 miliar karena gula produksinya tidak terserap pasar akibat tekanan gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi.

"Di tingkat petani, dampaknya terlihat dari anjloknya harga molase atau tetes tebu. Dari sekitar Rp1.900 menjadi sekitar Rp1.000 per liter pada Maret 2026, hampir separuh dari harga sebelumnya," ungkapnya.

Amran juga mengungkapkan petani tebu di Jawa Timur sempat mengancam melakukan mogok massal karena puluhan ribu ton gula hasil panen menumpuk di gudang dan belum terserap pasar. Kondisi tersebut diperparah dengan tertundanya pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara yang direncanakan untuk membeli gula petani. Penundaan itu disebut telah berlangsung hingga delapan periode panen.

Menurut perhitungan Kementerian Pertanian, gula petani yang tidak terserap diperkirakan mencapai sekitar 1,6 juta ton dengan potensi kerugian ekonomi bagi petani berkisar Rp4 triliun hingga Rp7 triliun.

"Yang terjadi di lapangan, kita buka saja, rafinasi banjir. Kalau bocor, bocor sedikit. Ini banjir dan petani tebu rugi luar biasa," tegas Amran.

Persoalan penyerapan hasil panen tersebut juga memicu aksi protes petani di sejumlah daerah. Menteri Pertanian menyebut ribuan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Blora, Jawa Tengah, dua kali menggelar demonstrasi pada April dan Juni 2026. Dalam aksi kedua, para petani bahkan

menumpahkan hasil panen tebu di depan pabrik gula sebagai bentuk protes atas minimnya penyerapan produksi.

Untuk mengatasi persoalan di hulu maupun hilir, pemerintah kini mewajibkan seluruh perusahaan gula rafinasi dan importir gula mentah membangun kebun tebu sendiri.

"Semua perusahaan swasta yang bergerak di industri gula wajib membangun kebun sendiri. Begitu juga para importir. Tidak ada lagi toleransi bagi yang hanya mengandalkan impor tanpa berkontribusi membangun kebun di dalam negeri," kata Amran.

Ia kembali menegaskan, "Para importir rafinasi wajib membangun kebun tebu. Tidak bisa terus-menerus bergantung pada bahan baku impor sementara petani tebu dalam negeri kesulitan menyerap hasil panennya."

Menurut Amran, kewajiban tersebut sebenarnya bukan kebijakan baru. Dasarnya telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan setiap unit pengolahan hasil perkebunan berbahan baku impor membangun kebun sendiri paling lambat tiga tahun setelah mulai beroperasi.

Bahkan sebelum undang-undang tersebut terbit, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengharuskan perusahaan pengolahan gula memiliki kebun tebu sendiri dengan kemampuan memasok sedikitnya 20 persen kebutuhan bahan baku pabrik. (wid,ist,ini/dya)

Kebijakan itu diambil setelah pemerintah menilai industri gula nasional selama bertahun-tahun dibebani tingginya ketergantungan terhadap impor gula mentah (raw sugar), lemahnya penegakan regulasi, serta merosotnya kesejahteraan petani tebu akibat hasil panen yang tidak terserap pasar. Amran mengatakan target swasembada gula kali ini tidak lagi sekadar menjadi wacana.

Menurutnya, pemerintah akan menjalankan seluruh instrumen kebijakan secara bersamaan agar produksi gula nasional meningkat dan ketergantungan impor dapat dihentikan.

"Swasembada gula, tidak boleh lagi tertunda. Karena itu, semua upaya, mulai dari penertiban kebun wajib, peremajaan tebu, sampai penindakan rafinasi ilegal akan diterapkan secara serentak segera. Ini bukan sekadar target di atas kertas. Petani sudah menderita cukup lama, sekarang saatnya negara hadir dan membuktikan janji swasembada itu nyata," kata Amran dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Salah satu program utama yang

JEJAK DOLAR SINGAPURA DARI KUANSING UNTUK RAJA JULI

Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan gratifikasi yang menyeret Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mengungkap adanya aliran uang yang diduga berasal dari mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, lembaga antirasuah kini memperluas penyelidikan dengan menelusuri proses penukaran uang rupiah menjadi dolar Singapura, mekanisme pengumpulan dana, hingga memastikan apakah seluruh uang yang sempat diterima telah benar-benar dikembalikan.

Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada 27-28 Juli 2026 memperlihatkan bahwa fokus penyidikan tidak lagi hanya pada dugaan penyerahan uang kepada pihak Kementerian Kehutanan, tetapi juga pada asal-usul dana, pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan uang, serta jumlah pasti uang yang sempat berpindah tangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sedang mengumpulkan bukti terkait penukaran uang di money changer yang diduga digunakan untuk menyiapkan pemberian kepada pihak di Kementerian Kehutanan.

"Penyidik meminta keterangan dari saksi-saksi terkait penukaran uang di money changer yang digunakan untuk pemberian uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan," kata Budi Prasetyo, Rabu (29/7/2026).

Dalam penyidikan tersebut, KPK memeriksa dua direksi perusahaan penukaran valuta asing di Pekanbaru, Riau, yakni WS dan AH. Keduanya diminta keterangan mengenai transaksi penukaran uang rupiah menjadi mata uang asing yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu, penyidik juga memeriksa pihak swasta berinisial TKA serta aparat sipil sipil Pemerintah Provinsi Riau berinisial FZ. Pemeriksaan terhadap FZ tidak hanya menyangkut aktivitas penukaran uang, tetapi juga dugaan adanya perintah dari Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansyah.

Tak berhenti di sana, Kepala Desa Setiang Rasid Asmianto turut diminta keterangan mengenai dugaan pengumpulan dana untuk Suhardiman Amby yang kemudian disebut-sebut diberikan kepada pihak Kementerian Kehutanan.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan uang "pelicin" dalam pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelumnya, KPK telah mengungkap bahwa dana yang dikumpulkan mencapai sekitar 46.500 dolar Singapura. Uang itu diduga berasal dari berbagai sumber,



Menteri Kehutanan
Raja Juli Antoni

mulai dari koperasi, kepala desa hingga camat sebelum dikonversi ke mata uang asing.

Kala itu Budi Prasetyo menjelaskan konstruksi awal perkara.

"Bupati diduga melalui hub atau perantara melakukan pengumpulan sejumlah uang dari KUD. Ada juga pemberian atau pengumpulan uang ini dari kepala desa ataupun camat. Kemudian setelah uang-uang itu terkumpul, dikonversi dalam bentuk Singapore Dollar. Total sekitar SGD46.500. Yang kemudian itu masuk ke Bupati," ujar Budi.

Menurut KPK, uang tersebut diduga dipersiapkan untuk memuluskan pengurusan pelepasan kawasan HPT melalui Kementerian Kehutanan.

"Dari situ kemudian diduga Bupati ini menyiapkan atau memberikan uang ini kepada pihak Kementerian Kehutanan. Tentu ini masih akan didalami, apakah seluruhnya atau sebagian atau berapa, itu masih akan terus didalami," kata Budi.

Meski demikian, penyidik belum menyimpulkan apakah seluruh dana sebesar SGD46.500 itu benar-benar diberikan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni atau hanya sebagian.

Berapa Nilai Uangnya?

Selain mengusut asal-usul uang, KPK juga mendalami jumlah uang yang sebenarnya telah dikembalikan oleh Raja Juli Antoni.

Budi mengatakan, penyidik masih memastikan apakah seluruh uang yang sempat diterima telah dikembalikan atau masih ada bagian yang belum diserahkan kepada

penyidik.

"Penyidik masih terus mendalami apakah uang yang diberikan tersebut sudah seluruhnya dikembalikan," ujarnya.

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati pada Selasa (28/7). Mereka terdiri atas Wakil Ketua KUD Prima Sehati EW, Bendahara KUD Prima Sehati JHS, dan anggota koperasi SPR.

Kepada para saksi tersebut, penyidik menggali informasi mengenai pemberian uang dalam bentuk dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan sekaligus proses pengembaliannya.

"Kepada sejumlah saksi tersebut, penyidik secara umum mendalami keterangan terkait pemberian sejumlah uang dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan dan pengembalian uangnya," kata Budi.

Dalam agenda pemeriksaan yang sama, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua KUD Prima Sehati yang juga Ketua DPRD Kuantan Singingi Juprizal, dua pihak swasta berinisial HDS dan FJR, serta RFZ yang merupakan anak Juprizal.

Keempat saksi tersebut belum memenuhi panggilan penyidik. Menurut Budi, mereka diduga mengetahui proses pengembalian uang dari pihak Kementerian Kehutanan melalui ajutan Menteri Kehutanan.

"Saksi-saksi tersebut diduga mengetahui terkait dengan pengembalian uang dari Kemenhut melalui ajutan Menteri Kehutanan. Untuk itu, penyidik akan melakukan pemanggilan kembali," ujarnya.

KRONOLOGI DUGAAN GRATIFIKASI AMPLOP RAJA JULI ANTONI

- **2 Juni 2026**
Suhardiman Amby bertemu Menhut Raja Juli Antoni dan meninggalkan amplop putih. Raja Juli memerintahkan ajutan mengembalikannya tanpa dibuka.
- **12 Juni 2026**
Amplop dikembalikan kepada perwakilan Suhardiman di Polres Kuansing, disertai dokumen dan tanda terima.
- **29-30 Juni 2026**
KPK menggelar OTT di Kuansing. Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain diamankan terkait dugaan suap jual beli jabatan.
- **1 Juli 2026**
KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan satu pihak swasta sebagai tersangka. Penyidikan berkembang ke dugaan gratifikasi pelepasan HPT.
- **3 Juli 2026**
Raja Juli melapor ke KPK dan mengumumkan penolakan gratifikasi.
- **17 Juli 2026**
KPK menolak laporan karena uang telah dikembalikan langsung kepada pemberi, bukan diserahkan ke KPK.
- **27-29 Juli 2026**
Penyidikan diperluas. KPK menelusuri asal dana, penukaran ke dolar Singapura, penyerahan, dan pengembalian uang.

Dalam konstruksi perkara yang sebelumnya dipaparkan KPK, sedikitnya 12 ribu dolar Singapura diduga dimasukkan Suhardiman Amby ke dalam sebuah amplop yang diberikan kepada Raja Juli Antoni saat keduanya bertemu di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Sekitar sepuluh hari kemudian, tepatnya 12 Juni 2026, amplop tersebut disebut telah dikembalikan Raja Juli kepada pihak Suhardiman. Uang itu kemudian disita penyidik dari Ketua DPRD Kuantan Singingi sekaligus Ketua KUD Prima Sehati, Juprizal.

Namun KPK masih mendalami apakah nilai uang yang diterima Raja Juli hanya sebesar SGD12.000 atau lebih besar dari jumlah tersebut.

Pendalaman itu dilakukan karena saat Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi kepada KPK, ia tidak mencantumkan nominal uang yang terdapat di dalam amplop.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sepuluh orang.

Sehari kemudian, mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. (wid,ist,kum/dya)

Jawab Keluhan Pokdarwis, Regulasi Khusus Kajoetangan Digodok

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menggodok regulasi khusus untuk memperkuat perputaran ekonomi di Kampoeng Heritage Kajoetangan.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyampaikan, langkah tersebut menjawab keluhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampoeng Heritage Kajoetangan. Mereka menyebut lonjakan kunjungan wisatawan ternyata belum sepenuhnya berdampak pada perekonomian warga di dalam kampung.

"Kami sudah ada rencana yang saat ini tengah digodok oleh Pak Sekda terkait aturan kawasan ekonomi khusus. Nanti mengatur boleh tidaknya PKL di sana, pastinya lebih detail aturannya nanti," ujar Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, regulasi tersebut tidak semata-mata bertujuan menata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), tetapi juga untuk mengurangi disparitas ekonomi antara pelaku usaha di koridor utama dengan masyarakat yang menjalankan usaha

di dalam kampung wisata.

Ali mengungkapkan, berdasarkan evaluasi Pemkot, jumlah kunjungan ke Kayutangan Heritage mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi di dalam kawasan kampung belum mengikuti pertumbuhan jumlah wisatawan.

"Kenaikan pengunjung hampir 100 persen, tetapi kenaikan ekonominya hanya 10-20 persen," paparnya.

"Karena ketika masuk, istilahnya tinggal sisa-sisa yang ada di dompet pengunjung karena sudah habis saat di koridor," imbuhnya.

Selain persoalan disparitas ekonomi, keberadaan PKL di koridor Kayutangan Heritage juga dikeluhkan karena dinilai mengganggu ketertiban kawasan. Menurut Ali, keluhan tersebut datang tidak hanya dari Pokdarwis, tetapi juga pelaku usaha resmi di koridor, yang selama ini menjalankan kewajiban membayar pajak daerah.

Dijelaskannya, koridor Kayutangan Heritage dipenuhi kafe, restoran, dan pelaku usaha resmi

yang telah mengantongi izin usaha. Oleh karena itu, Pemkot berkeinginan menciptakan iklim usaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Ali menambahkan, penataan kawasan juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkunjung ke Kayutangan Heritage beberapa waktu lalu, persoalan tersebut turut disampaikan oleh masyarakat dan Pokdarwis.

"Beliau juga menyampaikan agar segera ditindaklanjuti supaya tidak menjadi kawasan yang kumuh," ungkapnya.

Untuk itu, aturan yang tengah dikaji akan difokuskan terlebih dahulu di kawasan Kayutangan Heritage. Meski demikian, pemerintah masih menganalisis apakah regulasi tersebut

Ilustrasi: Pengunjung Kampoeng Heritage Kajoetangan, Kelurahan Kidul dalam, Kota Malang. (Santi/Lentera)



cukup dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) atau memerlukan dasar hukum lain.

"Kami nanti akan melihat apakah di tempat-tempat lain juga butuh. Tetapi karena Kayutangan Heritage ini sudah menjadi ikon, berkenaan dengan potensi ekonomi lokal yang ada di sana, kami akan buat aturan khusus. Karena sampai hari ini belum ada," jelasnya. (Santi/Dya)

Gigitan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Malang Tembus 127 Kasus



Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Titis Ari Respatilatsih. (foto: ist)

MALANG - Kasus penyakit zoonosis di Kabupaten Malang menunjukkan tren peningkatan. Hingga pekan keempat Juli 2026, tercatat 127 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) dan 4 kasus leptospirosis.

Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperkuat kesiapsiagaan melalui edukasi, komunikasi risiko, dan kolaborasi lintas sektor guna mencegah potensi penularan penyakit dari hewan ke manusia.

"Berdasarkan data Surveilans

Kesehatan Daerah (SKDR), jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang mencatat tiga kasus leptospirosis dan 24 kasus gigitan hewan penular rabies," ujar Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Titis Ari Respatilatsih, dikutip pada Rabu (29/7/2026).

Meski demikian, Titis menyebut Kabupaten Malang hingga kini masih berstatus bukan daerah endemis rabies serta tidak mencatat kasus flu burung pada manusia maupun antraks dalam lima tahun terakhir.

Dikatakannya, peningkatan kewaspadaan menjadi langkah penting agar potensi kedaruratan kesehatan akibat penyakit zoonosis dapat dicegah sejak dini.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian penyakit tidak hanya ditentukan oleh respons saat wabah terjadi, tetapi juga melalui penguatan komunikasi risiko, sistem surveilans,

serta kolaborasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Keberhasilan pengendalian penyakit juga bergantung pada penguatan komunikasi risiko, surveilans, dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan sejak dini," kata Titis.

Sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan tersebut, menurutnya Pemkab Malang telah menggandeng Portal Kesehatan Masyarakat (Portkesmas) dan Pokja RCCE menggelar Lokakarya Edukasi Pencegahan Penyakit Zoonosis di Puskesmas Tumpang.

Melalui lokakarya tersebut, dikatakannya, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai penyakit zoonosis, memperkuat komunikasi risiko, serta membangun koordinasi lintas sektor. Agar daerah lebih siap menghadapi ancaman penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Sementara itu, Plt Kabis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Lucia Endah Sukei menjelaskan, sebagian besar penyakit zoonosis dapat dicegah apabila masyarakat memahami

cara penularannya dan menerapkan langkah pencegahan secara konsisten.

Dikatakannya, rabies dapat dicegah melalui vaksinasi rutin terhadap hewan peliharaan. Sedangkan risiko leptospirosis dapat ditekan dengan menggunakan alas kaki tertutup saat beraktivitas, terutama pada musim hujan ketika air berpotensi tercemar urine tikus.

"Pada musim hujan, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap leptospirosis yang dapat menyebar melalui air yang tercemar urine tikus," paparnya.

Selain itu, masyarakat diminta menghindari kontak dengan unggas yang sakit atau mati mendadak guna mencegah penularan flu burung. Warga juga diimbau tidak menyembelih maupun mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak karena berpotensi menularkan antraks.

"Apabila menemui hewan ternak yang mati mendadak, segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang agar dapat segera ditindaklanjuti," kata perempuan yang akrab disapa Kesi tersebut. (Santi/Dya)

MYANMAR SAHKAN UU ANTI-ONLINE SCAM: PEREKTRUT DIANCAM HUKUM MATI

Parlemen Myanmar resmi mengesahkan undang-undang (UU) anti-penipuan daring yang memuat sanksi pidana berat terhadap pelaku kejahatan siber. Mulai dari penjara minimal 10 tahun, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati bagi pelaku yang merekrut, menyiksa, menahan, atau memaksa orang lain bekerja sebagai operator online scam. Regulasi tersebut disahkan dalam sidang gabungan dua kamar parlemen pada Selasa (28/7/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan industri penipuan daring yang berkembang pesat di negara itu.

Ketua Parlemen Myanmar Uni U Aung Lin Dwe mengatakan RUU tersebut disetujui setelah melalui pembahasan dan sejumlah amandemen dalam sidang gabungan parlemen.

"Rancangan undang-undang anti-penipuan daring tersebut disahkan hari ini dalam sidang gabungan kedua kamar parlemen, setelah beberapa amandemen disetujui melalui pemungutan suara."

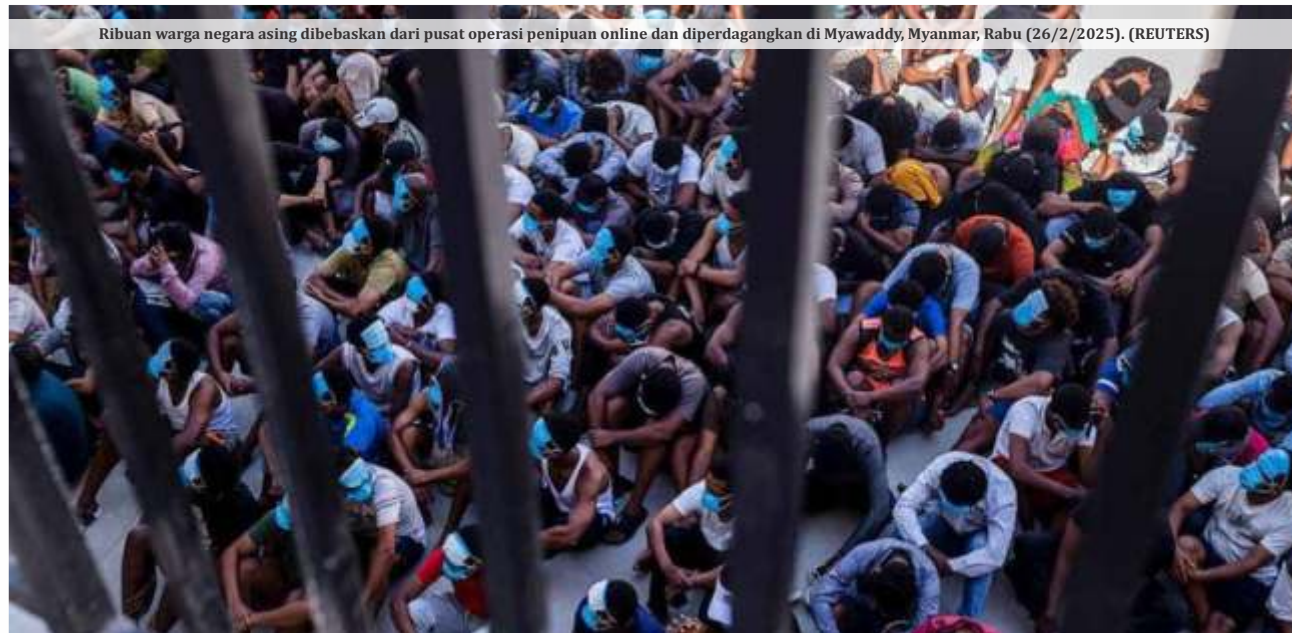
Dalam keterangan lainnya, Aung Lin Dwe juga menyatakan bahwa RUU Anti-Online Scam disahkan setelah anggota parlemen menyetujui perubahan terhadap rancangan undang-undang dalam rapat gabungan majelis rendah dan majelis tinggi. Perubahan tersebut hanya bersifat teknis dan tidak mengubah substansi utama aturan.

Sementara itu, anggota Majelis Rendah Myanmar Aye Chan menegaskan seluruh ketentuan pokok tetap dipertahankan, termasuk ancaman hukuman berat bagi pelaku eksploitasi pekerja di pusat-pusat penipuan daring.

Undang-undang baru tersebut mengatur hukuman penjara paling singkat 10 tahun bagi pelaku tindak pidana tertentu, sedangkan operator pusat penipuan daring maupun penipuan berbasis mata uang kripto dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Apabila tindak pidana tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenai hukuman mati.

"Jika melakukan pelanggaran tersebut menyebabkan kematian, hukuman mati akan dijatuhkan."

Pemerintah Myanmar menyatakan regulasi tersebut



Ribuan warga negara asing dibebaskan dari pusat operasi penipuan online dan diperdagangkan di Myawaddy, Myanmar, Rabu (26/2/2025). (REUTERS)

menjadi dasar hukum baru untuk memperkuat pemberantasan kejahatan siber yang selama ini berkembang di kawasan perbatasan negara itu, terutama wilayah yang berbatasan dengan Thailand.

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan seperti Myawaddy, Shwe Kokko, dan KK Park dikenal sebagai pusat operasi sindikat online scam lintas negara yang menjalankan penipuan investasi, asmara (romance scam), telekomunikasi, hingga mata uang kripto.

Keberadaan pusat-pusat penipuan tersebut berkaitan erat dengan perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta militer 2021. Kondisi keamanan yang memburuk membuat sejumlah wilayah perbatasan berada di luar

kendali penuh pemerintah, sehingga dimanfaatkan kelompok kriminal untuk membangun kompleks penipuan berskala besar.

PBB Singgung Perdagangan Manusia Global

Menurut laporan International Organization for Migration (IOM), sekitar 300.000 orang diperkirakan bekerja di kompleks penipuan daring di Myanmar, Kamboja, dan Laos. Lembaga yang menginduk kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu mencatat korban berasal dari lebih dari 80 negara, direkrut melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi di media sosial sebelum paspor mereka disita dan dipaksa melakukan penipuan secara daring. Banyak korban mengalami penyiksaan, pengekangan, pemerasan, hingga kekerasan fisik.

Direktur Jenderal IOM Amy Pope menyebut praktik tersebut telah berkembang menjadi jaringan perdagangan manusia global yang membutuhkan respons internasional secara terpadu untuk membongkar sindikat sekaligus melindungi korban.

"Orang-orang yang terjebak di kompleks penipuan daring merupakan korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan tindak kejahatan lewat kekerasan,

ancaman, dan pemaksaan," kata Pope, yang sebelumnya bekerja sebagai jaksa dalam kasus-kasus perdagangan manusia.

"Kita harus bekerja sama untuk mendukung para penyintas, menghentikan para pelaku perdagangan manusia, dan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan jaringan kriminal tersebut," tambahnya.

Besarnya skala industri tersebut juga tercermin dari nilai ekonominya. Berbagai laporan internasional memperkirakan industri online scam di Myanmar menghasilkan miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahun melalui berbagai modus, mulai dari investasi palsu, penipuan mata uang kripto, penyamaran sebagai petugas pemerintah, hingga romance scam yang menyasar korban di China, negara-negara ASEAN, Eropa, dan Amerika Utara.

Meski berbagai operasi penindakan telah dilakukan, aktivitas sindikat belum sepenuhnya berhenti. Investigasi Wired bersama International Justice Mission (IJM) bahkan menemukan sedikitnya 25 kompleks penipuan baru dibangun atau diperluas di wilayah Myawaddy dalam enam bulan terakhir berdasarkan analisis citra satelit. (wid ist,rtr,vie/dya)

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di penipuan online dibebaskan tentara Thailand di wilayah perbatasan Mae Sot. (ap.dok)



Menyesuaikan Olahraga dengan Siklus Menstruasi, Benarkah Perlu?

Ada kalanya tubuh terasa begitu bertenaga untuk berolahraga. Lari terasa ringan, latihan beban dapat diselesaikan tanpa banyak kesulitan, bahkan semangat untuk bergerak meningkat. Namun, beberapa hari atau minggu kemudian, tubuh mendadak terasa cepat lelah, otot lebih mudah pegal, dan motivasi berolahraga ikut menurun.

Bagi banyak perempuan, perubahan tersebut bukan sekadar persoalan suasana hati, melainkan berkaitan dengan fluktuasi hormon yang terjadi sepanjang siklus menstruasi.

Belakangan, konsep cycle syncing atau menyesuaikan pola aktivitas fisik dengan fase siklus menstruasi semakin populer di media sosial, terutama TikTok. Pendekatan ini mengajak perempuan mengenali perubahan hormonal agar dapat memilih jenis olahraga yang dianggap paling sesuai dengan kondisi tubuh pada setiap fase.

Meski begitu, para ahli menegaskan bahwa konsep tersebut masih memerlukan lebih banyak bukti ilmiah. Yang jauh lebih penting adalah memahami respons tubuh sendiri dan menyesuaikan intensitas latihan berdasarkan kondisi fisik yang dirasakan.

Secara medis, menstruasi bukan alasan untuk berhenti berolahraga. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) menjelaskan bahwa aktivitas fisik justru dapat membantu mengurangi sejumlah keluhan yang sering muncul saat haid, seperti nyeri menstruasi, perubahan suasana hati, hingga rasa lelah.

Senada dengan itu, National Health Service (NHS) Inggris menyebut olahraga ringan mampu meningkatkan pelepasan endorfin, yaitu hormon yang berperan sebagai pereda nyeri alami sekaligus membantu memperbaiki suasana hati.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun tetap merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150-300 menit setiap minggu, termasuk ketika sedang menstruasi apabila kondisi tubuh memungkinkan. Meski demikian, perubahan kadar

hormon estrogen dan progesteron sepanjang siklus memang dapat memengaruhi energi, daya tahan tubuh, kekuatan otot, hingga kemampuan tubuh untuk pulih setelah berolahraga. Karena itulah sebagian perempuan merasa lebih nyaman melakukan jenis latihan tertentu pada fase tertentu.

Fase Menstruasi

Fase pertama adalah menstruasi. Pada periode ini kadar estrogen dan progesteron berada pada titik terendah sehingga tidak sedikit perempuan mengalami penurunan energi, kram perut, nyeri pinggang, atau tubuh terasa lebih lemas dari biasanya. Kondisi tersebut membuat latihan berintensitas tinggi terasa lebih berat.

Namun, bukan berarti tubuh harus benar-benar beristirahat. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, pilates, bersepeda santai, maupun latihan beban dengan intensitas rendah justru dapat membantu memper lancar sirkulasi darah dan meredakan nyeri haid.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Education and Health Promotion bahkan menunjukkan aktivitas fisik secara rutin dapat membantu mengurangi gejala dismenore atau nyeri haid primer pada banyak perempuan.

Fase Folikular

Memasuki fase folikular, tubuh mulai memproduksi Follicle Stimulating Hormone (FSH), Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH), dan Luteinizing Hormone (LH) yang merangsang pematangan folikel di ovarium.

Setelah menstruasi berakhir, kadar estrogen meningkat secara bertahap sehingga energi tubuh juga ikut meningkat.

Banyak perempuan merasa lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih mudah menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Karena itu, fase folikular sering dianggap sebagai waktu yang ideal untuk mencoba olahraga seperti lari, latihan interval

intensitas tinggi atau HIIT, latihan beban yang lebih berat, dance fitness, hingga boxing.

Sejumlah kajian yang dimuat dalam British Journal of Sports Medicine menyebut peningkatan estrogen berpotensi mendukung performa latihan kekuatan dan membantu proses pemulihan otot, meski efek tersebut tidak selalu sama pada setiap individu.

Fase Ovulasi

Energi tubuh umumnya masih berada pada kondisi terbaik ketika memasuki fase ovulasi. Pada fase yang berlangsung sekitar tiga hingga lima hari ini, hormon LH mencapai puncaknya sehingga ovarium melepaskan sel telur yang telah matang.

Kadar estrogen masih relatif tinggi sehingga banyak perempuan merasakan stamina dan daya tahan tubuh berada dalam kondisi optimal. Tidak mengherankan jika latihan seperti lari, rowing, kickboxing, maupun latihan kekuatan masih terasa nyaman dilakukan.

Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kadar estrogen yang tinggi dapat membuat ligamen menjadi sedikit lebih lentur sehingga risiko cedera, khususnya cedera ligamen lutut atau anterior cruciate ligament (ACL), diduga sedikit meningkat pada sebagian atlet perempuan. Oleh karena itu, pemanasan yang cukup dan teknik latihan yang benar tetap menjadi hal penting.

Fase Luteal

Setelah ovulasi, tubuh memasuki fase luteal yang merupakan fase terpanjang dalam siklus menstruasi. Pada tahap ini folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan lapisan rahim apabila terjadi kehamilan.

Pada awal fase luteal, sebagian perempuan masih memiliki energi yang cukup baik. Namun menjelang akhir fase, kadar progesteron yang tinggi sering kali membuat tubuh lebih cepat lelah. Keluhan seperti perut kembung, payudara terasa nyeri, perubahan suasana hati, hingga sulit berkonsentrasi juga mulai muncul sebagai bagian dari sindrom pramenstruasi atau PMS.

Verywell Fit mengutip sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa suhu inti tubuh meningkat selama fase luteal akibat pengaruh progesteron. Kondisi tersebut membuat latihan ketahanan, seperti lari jarak jauh, terasa lebih berat terutama ketika dilakukan di cuaca panas. Karena itu, olahraga dengan intensitas lebih ringan seperti yoga, peregangan, berenang, latihan mobilitas, atau berjalan santai sering kali terasa lebih nyaman pada fase ini.

Meski konsep cycle syncing semakin populer, kalangan ilmuwan mengingatkan agar masyarakat tidak menganggapnya sebagai aturan yang harus diterapkan semua perempuan. International Olympic Committee (IOC) .(far,ist/dya)



Jepang Ciptakan 'Kulkas Manusia' Hadapi Panas Ekstrem

Jepang kembali memperkenalkan inovasi teknologi yang tak biasa. Kali ini, bukan robot atau kendaraan canggih, melainkan sebuah bilik pendingin yang dirancang khusus

untuk manusia. Perangkat bernama Do Hiemon Box itu diklaim mampu menurunkan suhu tubuh dan memberikan sensasi sejuk hanya dalam waktu sekitar lima menit.

Kehadirannya menjadi salah satu jawaban atas meningkatnya ancaman gelombang panas yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering melanda Negeri Sakura akibat perubahan iklim.

Berbeda dengan kulkas konvensional yang digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman, Do Hiemon Box merupakan bilik berukuran satu orang yang memungkinkan pengguna masuk, duduk, dan didinginkan oleh hembusan udara bersuhu rendah. Produk tersebut dikembangkan oleh perusahaan pendingin asal Jepang, SDRS, sementara pemasarannya ditangani oleh pemasok peralatan industri Trusco Nakayama.

Sasaran utamanya bukan konsumen rumah tangga, melainkan perusahaan dan institusi yang memiliki pekerja di lingkungan bersuhu tinggi, seperti proyek konstruksi, pabrik, gudang, sekolah, hingga berbagai area luar ruangan.

Melansir Gizmochina, desain Do Hiemon Box terinspirasi dari mesin penjual otomatis atau vending machine, salah satu ikon yang sangat mudah ditemui di Jepang. Bentuk luar perangkat memang menyerupai vending machine, tetapi bagian dalamnya dimodifikasi menjadi ruang pendingin lengkap dengan kursi untuk satu orang.

Saat pengguna berada di dalam bilik, suhu ruangan dipertahankan di kisaran 15 derajat Celsius. Pada saat bersamaan, udara dingin dengan suhu sekitar 5 derajat Celsius diarahkan ke bagian kepala, leher, bahu, dan punggung. Area-area tersebut dipilih karena menjadi

titik penting dalam proses pelepasan panas tubuh sehingga pendinginan dapat berlangsung lebih efektif.

Menurut klaim pengembangan, pengguna mulai merasakan sensasi dingin setelah berada di dalam bilik selama sekitar lima menit.

Jika digunakan hingga 10 menit, perangkat tersebut diklaim mampu membantu menurunkan suhu tubuh sekaligus meredakan gejala heat exhaustion.

Untuk alasan keselamatan, Do Hiemon Box juga dibekali tiga mode pendinginan serta sistem yang secara otomatis menghentikan operasi setelah digunakan selama 20 menit agar tubuh tidak mengalami pendinginan berlebihan.

Selain menawarkan kemampuan pendinginan yang cepat, perangkat ini juga diklaim lebih hemat energi dibandingkan pendingin ruangan konvensional. SDRS menyebut konsumsi listrik Do Hiemon Box hanya sekitar setengah dari kebutuhan listrik spot air conditioner (AC).

Proses pemasangannya pun jauh lebih sederhana karena tidak memerlukan instalasi permanen dan telah dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.

Karakteristik tersebut membuat Do Hiemon Box diproyeksikan sebagai fasilitas keselamatan kerja di berbagai lokasi dengan suhu tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan di Jepang mulai mencari solusi untuk melindungi pekerja dari risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas, terutama setelah pemerintah semakin memperketat perhatian terhadap keselamatan pekerja selama musim panas. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Rahasia Gaya Old Money yang Terlihat Elegan dan Tak Lekang Waktu

Tren fesyen selalu berputar. Hari ini warna tertentu menjadi primadona, besok siluet baru mengambil alih media sosial. Namun di tengah cepatnya pergantian tren, satu gaya justru terus bertahan dan kembali digemari generasi muda: old money aesthetic. Di TikTok, Instagram, hingga Pinterest, tagar old money telah ditonton miliaran kali. Estetika ini identik dengan

penampilan yang rapi, sederhana, dan berkelas. Bukan tentang mengenakan tas atau pakaian berharga puluhan juta rupiah, melainkan bagaimana seseorang membangun citra melalui potongan busana yang klasik, material berkualitas, serta perpaduan warna yang tidak mencolok.

Fenomena ini turut mendorong banyak orang menata ulang isi lemari pakaian. Alih-alih terus membeli tren terbaru, mereka mulai berburu blazer klasik, celana jeans berpotongan lurus, sepatu kulit, hingga gaun sederhana yang bisa dikenakan bertahun-tahun.

Menariknya, sejumlah pakar fesyen menilai gaya old money sebenarnya lebih dekat dengan konsep investasi pakaian (investment dressing) daripada sekadar mengikuti estetika media sosial.

Bukan Berarti Serba Mewah

Istilah old money awalnya merujuk pada keluarga-keluarga kaya lama di Eropa maupun Amerika Serikat yang mewarisi kekayaan lintas generasi. Dalam dunia mode, istilah tersebut berkembang

menjadi simbol penampilan yang tidak berusaha menunjukkan kemewahan secara berlebihan.

Majalah Vogue, Harper's Bazaar, hingga The New York Times beberapa kali menyoroti bangkitnya tren quiet luxury dan old money aesthetic setelah pandemi. Berbeda dengan era logomania yang mengutamakan logo besar sebagai simbol status, quiet luxury lebih mengedepankan kualitas bahan, jahitan presisi, serta desain yang minimalis.

Konsultan tren global WGSN juga mencatat bahwa konsumen, khususnya Generasi Z dan milenial, mulai bergeser menuju konsumsi fesyen yang lebih berkelanjutan. Mereka lebih selektif membeli pakaian yang dapat dipakai dalam jangka panjang dibanding mengikuti tren yang cepat berganti.

Kualitas Bahan-Warna Menentukan

Menurut para pakar mode, kesan mahal tidak selalu berasal dari harga pakaian. Yang lebih menentukan justru proporsi, kualitas bahan, warna, dan kecocokan ukuran.

Warna-warna netral seperti putih, hitam, krem, abu-abu, cokelat, navy, hingga olive menjadi ciri khas gaya old money. Palet tersebut membuat setiap item lebih mudah dipadukan sehingga tampilan terlihat harmonis.

Selain itu, bahan alami seperti katun, linen, wol, tweed, hingga kulit asli atau kulit berkualitas tinggi cenderung lebih tahan lama dibanding bahan sintesis murah.

Penelitian dalam bidang psikologi fesyen juga menunjukkan bahwa pakaian yang rapi dengan potongan sederhana dapat meningkatkan persepsi profesionalisme, kompetensi, dan kepercayaan seseorang di mata orang lain. Dengan kata lain, kesan

elegan sering kali lahir dari kerapian, bukan kemewahan.

Membangun tampilan old money tidak berarti harus mengganti seluruh isi lemari. Banyak orang sebenarnya sudah memiliki sebagian item utamanya.

Blazer Berkualitas

Blazer menjadi investasi fesyen yang hampir tidak pernah kehilangan relevansi. Item ini dapat dikenakan untuk bekerja, menghadiri acara formal, maupun dipadukan dengan jeans untuk tampilan kasual.

Pilih blazer dengan struktur bahu yang rapi, bahan cukup tebal, serta warna netral seperti hitam, navy, krem, atau abu-abu. Hindari motif yang terlalu ramai agar lebih mudah dipadukan dengan berbagai pakaian.

Sepatu Oxford

Sepatu Oxford dikenal sebagai salah satu model sepatu klasik yang telah digunakan sejak abad ke-19. Hingga kini, desainnya hampir tidak berubah.

Sepatu kulit dengan perawatan yang baik dapat bertahan bertahun-tahun sehingga justru lebih ekonomis dibanding sering membeli sepatu mengikuti tren. Oxford juga fleksibel digunakan bersama celana kain, jeans, maupun gaun bergaya minimalis.

Gaun Sempel

Dalam estetika old money, gaun tidak harus berasal dari rumah mode ternama. Long dress maupun midi dress dengan potongan bersih, tanpa detail berlebihan, justru menjadi pilihan utama. Warna netral atau pastel lembut memberikan kesan anggun yang tidak mudah ketinggalan zaman. (far,ist/dya)



Sudah 17 Pemenang ...dari Hal 1

Penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama barang bukti uang tunai Rp2 miliar tidak hanya menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat KPK, tetapi juga menyingkap ironi seorang pejabat berharta Rp21 miliar yang tetap tergiur praktik jual-beli jabatan dan suap proyek.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut lewat keterangan singkat, "Benar."

Operasi senyap KPK berlangsung lintas wilayah yaitu Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Total sebanyak 21 orang diamankan. Rinciannya, tim Satgas KPK menangkap Anom bersama 4 orang lainnya di Jakarta, sementara 15 orang diamankan di Pemalang dan 1 orang di Purworejo. Dari 21 pihak yang terjaring, 12 orang termasuk Anom dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan intensif.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini bermula dari dugaan aliran dana proyek di lingkungan Pemkab Pemalang. "Adapun kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang," kata Budi kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

KPK menduga aliran dana tak berhenti pada proyek fisik. Ada indikasi praktik jual-beli jabatan dalam penataan aparatur birokrasi di internal pemkab. "Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan," ujar Budi.

Dari operasi ini, penyidik menyita barang bukti utama berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar, ditambah sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen transaksi. KPK juga menyegel beberapa ruangan vital, termasuk ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang serta sebuah rumah kerabat di Mulyoharjo. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Anom soal penangkapannya.

Di sisi lain, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK mencatat kekayaan Anom Widiyantoro mencapai Rp21 miliar. Anom, yang baru dilantik pada Februari 2025 dan sebelumnya berkarier sebagai eksekutif BUMN, kini justru diduga terlibat penerimaan suap bernilai miliaran rupiah di tengah aset pribadinya yang jauh lebih besar.

Kesenjangan itu memantik sorotan pada besarnya beban biaya politik (cost politics) dalam kontestasi pilkada. Modal besar yang dikeluarkan saat pencalonan disinyalir menjadi pemicu tekanan

finansial bagi kepala daerah terpilih untuk memutar kembali modal politiknya lewat jaringan patronage dan kompensasi proyek daerah.

Penangkapan Anom memicu keprihatinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Ia menyayangkan kasus ini terus berulang, padahal Pemprov Jateng sudah menjalankan berbagai langkah mitigasi pencegahan korupsi.

"Secara dinas, saya sebagai Gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya," kata Luthfi, Rabu (29/7/2026).

Luthfi mengklaim pihaknya sudah berulang kali mengingatkan jajaran kepala daerah agar tak terlibat praktik transaksional, mulai dari retret, penandatanganan MOU, hingga pakta integritas. "Tak tambah tagline jabatan kita, 'no titip-titip, no jasa penitipan'. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK, saya sendiri yang akan menindak kalau sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar," tegasnya.

Meski begitu, Luthfi menekankan bahwa dugaan tindak pidana ini adalah tanggung jawab individu, bukan institusi. "Jadi enggak ada bupati, tapi perseorangan. Perseorangan ini siapa? Ya pelaku yang memenuhi kriteria bukti cukup, seseorang dianggap sah dilakukan OTT oleh KPK," ujarnya, seraya meminta publik menunggu keterangan resmi KPK.

Melihat fenomena yang terus berulang, Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai rentetan OTT kepala daerah bukan kejadian luar biasa yang berdiri sendiri, melainkan persoalan sistemik. "Situasi ini sebenarnya terus berulang. Ketika dalam waktu relatif singkat sudah ada 17 kepala daerah yang kembali tersangkut perkara korupsi, sebagian besar melalui OTT, itu menunjukkan bahwa persoalan ini tidak pernah benar-benar diselesaikan secara tuntas," katanya.

Ia juga menilai berbagai pembekalan formalitas dari pemerintah tak banyak mengubah perilaku koruptif kepala daerah. "Saya bahkan melihat retret kepala daerah yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak banyak berarti jika hasilnya tetap seperti ini. Artinya, pendekatan yang dibangun oleh pemerintah saat ini belum mampu menyelesaikan akar persoalan korupsi di tingkat daerah," tegasnya.

Parpol juga dinilai gagal menyeleksi kandidat. Herdiansyah menyebut partai politik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, karena lebih mengutamakan elektabilitas dan modal politik ketimbang rekam jejak dan integritas calon kepala daerah. "Ada kegagalan

partai politik sebagai pintu utama dalam menyeleksi dan menawarkan calon kepala daerah terbaik. Partai politik harus dikritik secara terbuka karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab sekaligus kegagalan mereka. Faktanya, partai politik justru lebih mengedepankan calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan modal politik yang besar, tetapi miskin integritas. Bahkan tidak sedikit yang sejak awal memiliki rekam jejak bermasalah," ungkapny.

Selain masalah rekrutmen politik, vonis yang terlampau ringan dinilai membuat efek jera menjadi nihil. Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Herdiansyah menyebut rata-rata vonis pelaku korupsi, termasuk kepala daerah, hanya sekitar 1,5 tahun penjara.

"Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa hingga kini belum ada efek jera bagi pelaku korupsi. Salah satu penyebabnya adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi, termasuk kepala daerah, masih sangat ringan. Rata-rata vonisnya hanya sekitar 1,5 tahun penjara. Hukuman seperti itu jelas tidak akan menimbulkan efek jera," tegasnya.

Parpol Mengaku Heran

Reaksi dari dua partai politik di DPR mengemuka setelah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Baik Partai Golkar maupun Partai NasDem sama-sama menyatakan keprihatinan atas kembali tertangkapnya kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi serta meminta adanya evaluasi agar praktik serupa tidak terus berulang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku heran fenomena kepala daerah yang berulang kali terjerat OTT KPK. Menurutnya, hampir setiap pekan muncul kabar penangkapan kepala daerah sehingga memunculkan pertanyaan apakah para pejabat tersebut sudah tidak mampu lagi membedakan tindakan yang termasuk korupsi.

"Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya," ujar Doli, Rabu (29/7/2026).

Selain itu, Doli juga mempertanyakan apakah ada pihak tertentu yang sengaja menjadikan penangkapan kepala daerah sebagai tontonan publik. Meski demikian, ia menegaskan hal itu hanya sebatas pertanyaan yang muncul dari fenomena yang terus berulang.

"Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan 'show up' penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-

17 KEPALA DAERAH HASIL PILKADA 2024 TERJARING OTT KPK (PER JULI 2026)

Ditangkap pada 2026



Maldi
(Wali Kota Madiun)

Pemerasan proyek & dana CSR. Tersangka.



Sudewo
(Bupati Pati)

Pemerasan jabatan desa & suap proyek. Tersangka.



Fadiah Arafik
(Bupati Pekalongan)

Suap pengadaan outsourcing. Tersangka.



Muhammad Fikri Thobari
(Bupati Rejang Lebong)

Suap ijon proyek. Tersangka.



Syamsul Auliya Rachman
(Bupati Cilacap)

Pemerasan setoran OPD. Tersangka.



Gatut Sunu Wibowo
(Bupati Tulungagung)

Pemerasan kepala dinas. Tersangka.



Edison
(Bupati Muara Enim)

Suap proyek & audit BPK. Tersangka.



Suhardiman Amby
(Bupati Kuantan Singingi)

Suap lelang jabatan Sekda. Tersangka.



Syah Afandini
(Bupati Langkat)

Suap pengaturan proyek. Tersangka.



Etik Suryani
(Bupati Sukoharjo)

Pemerasan jabatan & anggaran OPD. Tersangka.



Lalu Ahmad Zaini
(Bupati Lombok Barat)

Gratifikasi proyek infrastruktur. Tersangka.



Anom Widiyantoro
(Bupati Pemalang)

Fee proyek & jual beli jabatan. Tersangka.

Lanjutan dari Hal 1...

lama kehabisan komentar dengan fenomenaini," katanya.

Di sisi lain, Doli menegaskan Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum apabila kader Golkar maupun kepala daerah yang pernah diusung partai tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, Golkar juga akan terus memperkuat pembinaan kepada kader agar mengedepankan langkah-langkah pencegahan sehingga tidak terjerumus dalam praktik korupsi. (wid,ist,rls,kum/dya)

BGN AKUI TUNGGAKAN RP1,6 TRILIUN, TERBESAR UNTUK PEMBANGUNAN DAPUR

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi sorotan. Kali ini bukan mengenai menu, sasaran penerima, ataupun kualitas dapur, melainkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang mencapai Rp1,609 triliun. Nilai tersebut merupakan tagihan atas berbagai pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sepanjang Tahun Anggaran 2025, tetapi belum dibayarkan hingga berganti tahun anggaran.



Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center diresmikan di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (29/7/2026) untuk menerima aduan masyarakat terkait program MBG. (ANTARA)

Isu ini pertama kali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR pada 17 Juli 2026. Di hadapan anggota dewan, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan lembaganya masih memiliki tunggakan kepada berbagai mitra penyedia barang dan jasa.

"Tunggakan tahun 2025 ada Rp1,6 triliun yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026," kata Agustina. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak ketiga yang hingga kini belum menerima pembayaran.

Pernyataan tersebut segera memunculkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan lembaga yang mengelola salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.

Hampir dua pekan berselang, Kepala BGN Sudaryono meluruskan persepsi publik. Menurutnya, istilah yang tepat bukanlah "utang" dalam arti pinjaman, melainkan tunggakan pembayaran atas pekerjaan yang masih menjalani proses administrasi dan audit.

"Mengenai utang, ini tunggakan lah, bukan utang. Tunggakan ini ranah auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, saya kira dibayar."

Sudaryono menegaskan dirinya tidak akan memerintahkan pembayaran

secara sepihak sebelum seluruh tagihan dinyatakan sah oleh auditor.

"Semuanya trust in system, bukan trust in person. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai mekanisme, itu yang kita selesaikan."

Ia menambahkan proses verifikasi dipimpin Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga seluruh pembayaran akan mengikuti hasil audit dan rekomendasi lembaga pengawas.

Dari total Rp1,609 triliun, lebih dari separuh berasal dari belanja modal pembangunan dapur MBG yang mencapai Rp1,04 triliun.

Sisanya tersebar pada berbagai kebutuhan operasional, mulai dari jasa event organizer dan publikasi senilai Rp330 miliar, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rp111 miliar, bantuan pemerintah Program MBG Rp100 miliar, belanja bahan seperti seragam, call center, sendok, dan perlengkapan lainnya Rp16,1 miliar, hingga tagihan kepada Universitas Pertahanan sebesar Rp7,3 miliar.

Masih terdapat pula honor narasumber, perjalanan dinas, jasa konsultan, dan sewa kendaraan insidental.

Agustina menjelaskan sebagian anggaran pembayaran bahkan masih diblokir sehingga belum dapat dicairkan. Karena itu, pembayaran

baru dapat dilakukan terhadap tagihan yang telah lolos proses review oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, BPKP, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

"Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang sementara alokasi anggarannya masih diblokir akan dibayarkan setelah melalui proses review sesuai ketentuan," ujarnya.

Kasus tunggakan ini muncul ketika pemerintah justru tengah memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp268-270 triliun untuk memperluas jaringan SPPG dan meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

Menkes: 112 Juta Jiwa Kekurangan Gizi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sebanyak 112 juta penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari penentuan sasaran penerima, penyusunan standar menu, hingga percepatan operasional dapur di daerah dengan

prevalensi stunting tinggi.

Data tersebut berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Selain itu, hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah juga menunjukkan sebagian besar siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas masih mengalami persoalan gizi.

"Jadi 112 juta masyarakat itu masih kekurangan gizi di Indonesia," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan gizi di Indonesia masih jauh dari selesai. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dipandang sebagai instrumen penting untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Meski demikian, pemerintah mengakui implementasi MBG masih membutuhkan berbagai penyempurnaan. Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengundang para ahli gizi dari berbagai institusi untuk menyusun perbaikan tata kelola program. Pertemuan itu ditargetkan rampung sebelum 5 Agustus 2026.

"Sebelum 5 Agustus Kementerian Kesehatan dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka Indonesia," ujar Budi.

Ia menjelaskan pembahasan akan difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, menyempurnakan penetapan kelompok penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran berdasarkan usia, wilayah, dan tingkat kerawanan gizi.

"Kita mau refine sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, ibu hamil yang bagaimana."

Agenda kedua adalah menyusun standar nasional menu MBG berdasarkan rekomendasi ilmiah para ahli gizi. Menurut Budi, komposisi makanan akan disesuaikan dengan kebutuhan gizi serta karakteristik daerah sehingga tidak lagi menggunakan pendekatan yang seragam. (tin,kum,kcm,rls/dya)